
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DI DESA KARANG BAJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN LOMBOK UTARA

Oleh

Herfan Sabandi¹, Lalu Masyhudi² & Lalu M. Iswadi Athar³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Email : 1idnabasnafreh@gmail.com, 2laloemipa@gmail.com, & 3is.wadi@yahoo.co.id

Article History:

Received: 04-06-2023

Revised: 16-07-2023

Accepted: 21-07-2023

Keywords:

The Role of Government, Stakeholders, Management, Tourist Attractions.

Abstract: *This study discusses the role of the Karang Bajo Village Government as a Tourist Attraction in North Lombok Regency. This research was conducted to answer the problems in question, namely to determine the role of government in managing tourist attractions. This writing is presented descriptively to obtain an overview of the role of government and the management of tourist attractions. The method used in collecting data is by observation, interviews, documentation and literature study. The results of this study indicate that the role of the village government in managing tourist attractions is very important in terms of the government's ability to organize Karang Bajo Village. The role of the government as a stakeholder is very visible both as a policy creator, coordinator, facilitator, implementer, and as an accelerator. The conclusion that can be drawn regarding the role of the village government in the management of tourist attractions is that the important role of stakeholders in the management of tourist attractions in Karang Bajo Village is very much needed in order to maintain and preserve the culture in Karang Bajo Village. Karang Bajo Village still has room to develop and compete in the tourism world of North Lombok Regency.*

PENDAHULUAN

Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat aspirasinya, banyak ditemukan kritikan yang pedas terhadap kinerja pemerintah, khususnya pemerintah Desa sebagai garda terdepan dalam Pengelolaan Daya Tarik wisata.

Dilihat dari pelaksanaan otonomi daerah, Desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut pemerintah Desa dituntut memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Desa baik kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan maupun pengawasan, sehingga akan memperoleh kinerja pemerintah yang baik dalam Pengelolaan Daya Tarik wisata..

Menguatnya control Pengelolaan Daya Tarik wisata ditandai dengan saling ketergantungan antara masyarakat Desa dengan pemerintah Desa , terutama dalam pengelolaan sumber-sumber Daya Tarik Wiasata. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik, akibatnya timbul berbagai masalah seperti penataan Daya Tarik wisata yan kurang baik, masalah Pengelolaan Daya Tarik wisata yang sulit berjalan, serta terjadinya kegiatan ekonomi yang tidak

merata.

Kemudian dari pada itu pemerintah memiliki peranan yang sangat sentral dalam pengelolaannya. Peran pemerintah Desa Karang Bajo dalam mengelola pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), dan memperluas berbagai fasilitas, seluar dari peran dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata peran pemerintah desa karang bajo yakni dalam peran perencana, peran pendidik, peran peremaja kawasan, peran koordinasi, serta peran pembiayaan.

Tetapi dalam kurun waktu yang berjalan pasifnya pengelolaan Daya Tarik Wisata Karan Bajo, tidak terlepas dari peran pemerintah desa yang dibantu unsur pengelola lainnya yaitu pokdarwis dan masyarakat lokal. Strategi awal yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memenuhi unsur menjadi Desa Wisata, yakni dengan melakukan peremajaan tampilan desa melalui penataan ruang serta pengelolaan Rumah Adat Karan Bajo dengan mengusung tema Karan Bajo Berbudaya yang merupakan ciri khas desa tersebut. Meskipun demikian, realitanya masih terdapat beberapa permasalahan yang membelit dan belum mampu dipecahkan pemerintah desa sehingga ritme pengelolaan Daya Tarik Wisata di Desa Karang Bajo kurang stabil dan pasif. Adapun permasalahan yang dimaksud, pertama hubungan koordinasi konstruktif yang cenderung belum tercipta secara berkesinambungan diantara pihak pemerintah desa, pokdarwis, masyarakat. Kedua belum diberdayakannya keterlibatan masyarakat secara optimal dan proporsional. Kondisi tersebut mencitrakan bahwasanya belum adanya kesiapan dan kurangnya komitmen pemerintah desa dalam menjadikan bidang pariwisata sebagai program prioritas desa.

Dengan sektor industri pariwisata yang terus dikembangkan ini diharapkan Pemerintah Desa juga ikut berpartisipasi dan tetap menjaga sektor unggulan yang dijadikan salah satu pendapatan masyarakat. Dengan tetap dijaganya tempat wisata ini akan dapat menjadi warisan budaya.

LANDASAN TEORI

Penelitian sumber-sumber pustaka lainnya memiliki banyak manfaat bagi penelitian yang akan dilakukan. Berikut pemaparan dari sejumlah penelitian relevan tersebut. Penelitian pertama oleh Eka and Suwandani (2019). Penelitian yang Berjudul, peran pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam melakukan promosi wisata di daerah Lombok utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan teknik analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara menerapkan bauran promosi dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata, yaitu Iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan tatap muka dan direct marketing.

Penelitian kedua oleh Medi (2018) yang berjudul ‘ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata *Religi* Buntu bunake Kabupaten Tana Toraja. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah (Dinas Pariwisata) dalam pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten Tana Toraja sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang mencakup *Koordinator*, peran yang dilakukan pemerintah sebagai *koordinator* yaitu melakukan koordinasi dengan Instansi dan pembuatan strategi. *Fasilitator*, peran yang dilakukan pemerintah yaitu, menyediakan sarana dan prasaran dan menciptakan strategi promosi. *Stabilitator*, peran pmerintah sebagai stabilitator belum bagus karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Tana Toraja belum melibatkan pihak *investor* dan pihak swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. *Motivator*, peran yang di lakukan

pemerintah yaitu: memberdayakan masyarakat.

Penelitian ketiga oleh Cantania Mongkol (2015) metode yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan konsep strategi dari Rangkuti (2014:4) sebagai rujukan. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa menjadikan promosi sebagai strategi utama dalam mengembangkan potensi wisata budaya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini memiliki sisi perbedaan dan persamaan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran *stakeholder*. Sementara itu, perbedaan pada penelitian ini penelitian pertama dan ketiga mengkaji peran pemerintah dari aspek kegiatan promosi wisata, dan penelitian kedua dari pengelolaan dan pengembangan Daya Tarik Wisata. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Di Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Peran pemerintah desa dipilih untuk merumuskan pengelolaan secara konseptual sehingga dapat diaplikasikan dalam pengelolaan daya Tarik wisata karang bajo sebagai destinasi andalan atau yang terkenal di pulau Lombok Provinsi NTB.

Stakeholder menurut Hertifah (2003, h.39) *Stakeholder* adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (*positive* atau *negative*) oleh suatu kegiatan program pembangunan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Scheemer (2000) yang menyebutkan ‘*Stakeholders in a process are actors persons, groups or organizations with a vested interest in the policy being promoted*’. Pemangku kepentingan dalam suatu proses adalah orang-orang, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam kebijakan yang dipromosikan”.

Stakeholder dibagi menjadi 3 (Maryono et al.2005) dalam penelitian (Yosevita:25) antara lain:

- 1) *Stakeholder* Utama (Primer) *Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, serta program.
- 2) *Stakeholder* Pendukung (Sekunder) *Stakeholder* sekunder adalah bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program, dalam kebijakan atau sebuah proyek.
- 3) *Stakeholder* Kunci *Stakeholder* kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan.

Tahap pertama dalam menganalisis *stakeholders* adalah menetapkan pengaruh dan kepentingan “(Reed et al., 2009; Thompson, 2011; Gardner et al., 1986) dalam penelitian (Wakka : 10) :

- a. Subyek (*Subjects*)”. *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
- b. Pemain Kunci (*Key Players*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
- c. Pengikut Lain (*Crowd*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
- d. Pendukung (*Contest setters*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

Menurut Nugroho (2014, h.16-17) dalam penelitian Ali dkk, *stakeholder* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain:

- a. *Policy creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.

- c. Fasilitator yaitu *stakeholder* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d. Implementer yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Kemitraan menurut Sulistiyani (2004:130-131) dalam penelitian (Imelda:Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 2, Nomor 1.Hlm 3), diilhami dari *fenomena biologis* kehidupan *organisme* dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut:

- a. *Pseudo partnership* atau kemitraan merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya.
- b. Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang samasama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.
- c. Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramecium*". Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.

Menurut Handayani (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Fungsi Pengelolaan menurut Terry Siagan dalam Fathoni (2006) merumuskan mengenai penjelasan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

- 1) Perencanaan berarti persiapan atau penentuan-penentuan terlebih dahulu tentang apa yang akan dikerjakan di kemudian hari dalam batas waktu tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Perencanaan yang efektif harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu hal yang menyangkut perencanaan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perencanaan adalah memberi jawaban atas pertanyaan yang menyangkut dengan apa (*what*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*).
- 2) Pengorganisasian Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara *efektif* dan *efisien*. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
- 3) Pengarahan merupakan keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan.
- 4) Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana yang sudah ditetapkan

sebelumnya (Sutarno NS, 2004: 128). Pengawasan dilakukan untuk mengetahui : (a) Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya? (b) Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan, dan pemborosan?. (c) Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan, dan pemborosan. (d) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi.

Tujuan pengawasan adalah: (a) Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi. (b) Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi. (c) Mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Manajemen sendiri memiliki unsur-unsur yang sangat erat satu sama lain, dari semua unsur ini tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) *Man* (Sumber daya manusia) Ini merupakan unsur manajemen yang sangat penting, manusia membuat perencanaan dan mereka juga yang melakukan proses dalam mencapai tujuan tersebut.
- 2) *Money* (uang) Dalam suatu perusahaan tidak akan bisa menjalankan seluruh aktifitas sehari-harinya tanpa adanya biaya yang diukur dengan satuan sejumlah uang.
- 3) *Materials* (bahan baku) Adanya bahan baku atau materials ini merupakan unsur yang sangat vital dalam proses produksi.
- 4) *Machines* (Peralatan Mesin) Peralatan mesin ini digunakan sebagai pengolah bahan baku menjadi barang jadi, dengan adanya mesin maka waktu yang digunakan dalam proses pembuatan produksi akan menjadi lebih cepat dan efisien, bahkan tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalisir namun dibutuhkan sumber daya yang berkualitas agar hasilnya menjadi maksimal.
- 5) *Methods* (metode) Didalam sebuah manajemen dibutuhkan suatu metode atau *standartd opartional procedure* (SOP) yang baku untuk mengelolanya.
- 6) *Market* (pasar) Konsumen atau pasar merupakan elemen yang penting, tanpa adanya permintaan dari konsumen maka produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan akan vakum.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 dalam Syarifuddin, (2018:24) daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Maryani dalam Kirom, (2016:537) suatu daya tarik wisata harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, syarat-syarat tersebut, meliputi :

- 1) *What to see* Yaitu di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan “*entertainment*” bagi wisatawan. *What to see* meliputi pemandangan alam, kegiatan, kesenian dan atraksi wisata.
- 2) *What to do* Yaitu di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lama ditempat itu.
- 3) *What to buy* Yaitu tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang ke tempat asal.
- 4) *What to arrived* Yaitu di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi daya tarik wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut.

- 5) *What to stay* Yaitu bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur. Diperlukan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non berbintang dan sebagainya.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 ayat 5 dalam Rizkiyah & Herman, (2019:432) menyatakan pengertian daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut (Kirom ,2016:536). Tanpa adanya daya tarik di suatu tempat maka untuk kepariwisataan tersendiri sulit untuk dikembangkan. Faktor budaya menjadi salah satu hal yang dapat menarik wisatawan. Faktor budaya lahir dari warisan leluhur atau nenek moyang yang dikembangkan dan dikenalkan oleh pewarisnya. Untuk memperkenalkan budaya sebagai salah satu aspek dalam menarik minat wisatawan berkunjung maka harus ada strategi untuk menjaga kebudayaan yang ada dari segi warisan budayanya sendiri dan dari segi kompetitifnya.

Dalam pembangunan pariwisata, daya tarik wisata merupakan sasaran atau fokus utama oleh karena itu, menurut Marhendi dalam Sapti, (2019:573) penyajiannya perlu diperhatikan hal-hal atau memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) *Orisinality* (Keaslian) Daya tarik wisata yang ditampilkan hendaknya dijaga orisinalitas keasliannya (bukan tiruan) sehingga wisatawan hanya dapat melihat dan menikmati keindahan di tempat tersebut secara natural / alami.
- 2) *Variatif* (Bermacam-macam) Daya tarik yang dijual harus bervariasi (tidak monoton), hal ini dimaksudkan agar wisatawan merasa betah, sehingga *length of stay* (LOS) lama tinggal wisatawan diharapkan akan semakin panjang.
- 3) *Scarcity* (Kelangkaan) Yang dimaksud dengan *scarcity* adalah kelangkaan atau keterbatasan, artinya daya tarik wisata yang dimiliki dapat dijadikan produk unggulan yang tidak memiliki pesaing yang sama dalam perebutan segmen wisatawan tertentu daya tarik wisata yang dimiliki oleh suatu DTW tidak dimiliki oleh DTW yang lain.
- 4) *Wholesomeness* (Bermanfaat) Artinya bahwa daya tarik wisata memberi manfaat bagi wisatawan , jadi ada proses belajar (pembelajaran) yang diperoleh wisatawan setelah mengunjungi daya tarik yang bersangkutan.
- 5) *Uniqueness* (Keunikan) Sifat atau daya tarik wisata yang memiliki keunggulan *komperatif* dibanding daya tarik lainnya yang ada disekitarnya.

Totality (Keutuhan) Artinya bahwa daya tarik wisata harus merupakan satu kesatuan yang utuh (tak terpisah-pisah) yang pada dasarnya harus memiliki Aksesibilitas, *Public Utilities* atau bangunan fasilitas umum, dan Organisasi Pariwisata yang mengelolanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Peneliti memilih lokasi ini, karena di daerah ini masih sangat mempertahankan budayanya seiring dengan perkembangan zaman. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Desa Karang Bajo. Jarak tempuh perjalanan dari Kota Mataram ke Desa Karang Bajo sekitar 2-3 jam perjalanan. dan melewati beberapa kecamatan yang ada di Lombok Utara diantaranya: Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung. Kecamatan Gangga, dan Kecamatan Kayangan. Dalam perjalanan menuju Desa Karang Bajo akan tidak merasa jenuh dalam perjalanan tersebut Karena di sekitar jalan yang dilalui untuk menuju ke lokasi wisata ini masih berupa kawasan yang asri. Selain itu pemandangan indah sepanjang pantai yang ada di jalur Senggigi juga akan turut memanjakan mata selama menempuh perjalanan.

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi suatu cara memperoleh data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan. Metode observasi ini menggunakan observasi partisipatif yang artinya peneliti akan terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data. Selama observasi ini akan dibuat catatan yang berbentuk deskripsi potensi budaya di Kampung Adat Desa Karang Bajo. Wawancara suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan keriatannya dilakukan secara lisan, Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini dengan mewawancarai orang yang menjadi subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa Karang Bajo, Pemekel Adat Desa Karang Bajo, Penasehat Adat Desa Karang Bajo dan Ketua Remaja Desa Karang Bajo . Data yang terkumpul melalui wawancara adalah data yang tidak dapat diperoleh melalui proses observasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya. Data tersebut meliputi data dokumentasi potensi yang ada di Kampung Adat Desa Karang Bajo.

Penelitian ini menggunakan analisis konten (*content analysis*) sebagai metode penelitian. Analisis konten merupakan penelitian yang melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik analisis konten dilakukan melalui simbol *coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian dilakukan interpretasi atas hasilnya. Analisis konten dapat juga diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis konten juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut Krippendorff (2004), metode analisis konten adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara *objektif, sistematis, dan generalis*. *Objektif* dalam hal ini berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh peneliti lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. *Sistematis* artinya penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodean data agar tidak bias. *Generalis* artinya penemuan harus memiliki *referensi teoritis*. Informasi yang didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Maryono (2005) *stakeholder* dalam pengelolaan daya tarik wisata terdiri dari *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholders* primer meliputi Warga Desa Karang Bajo, Karang Taruna, dan POKDARWIS. Kegiatan pengelolaan Daya Taik Wisata menimbulkan dampak positif antara lain : (1) Terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga Desa Karang Bajo. (2) Adanya interaksi antara warga dengan wisatawan, sehingga terjadinya pertukaran informasi dan budaya. (3) Keterlibatan warga dalam kegiatan kepariwisataan seperti mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Karang Bajo serta partisipasi dalam kegiatan kelompok sadar wisata.

Stakeholders kunci meliputi Pemerintah Desa, BPD yang merupakan sub unit dari BUNDES dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai unsur perangkat daerah yaitu memiliki tugas

salah satunya dalam mengurus bidang pariwisata. *Stakeholders* sekunder meliputi pihak eksternal antara lain Dinas Pariwisata, Aparat Keamanan. Mereka memiliki kepedulian untuk memajukan dan mempromosikan Desa Wisata Karang Bajo.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia telah menjalankan suatu peran (Soekamto, 2004). Pengelolaan Daya Tarik Wisata Desa Karang Bajo dipengaruhi oleh peran *stakeholder internal* yaitu *stakeholder* primer dan kunci yang memiliki peran sebagai pelaksana, *policy creator*, *koordinator*, *implementer*, *fasilitator* dan *akselerator*. Sedangkan, *stakeholders eksternal* mencakup *stakeholders* sekunder atau pendukung yang berperan sebagai *fasilitator*.

Berikut pemaparan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Di Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

1) *Stakeholder* primer

Stakeholder primer merupakan *stakeholder* yang memiliki ikatan yang kuat hubungannya dengan penyusunan. Yang menjadi *stakeholder* primer diantaranya: Warga Desa Karang Bajo, POKDARWIS, dan Karang Taruna. Adapun kegiatan terkait peran dilaksanakan diantaranya:

- a. Menyediakan lahan untuk pengembangan area wisata.
- b. Terlibat dalam kegiatan pengelolaan daya Tarik wisata sebagai pelaku usaha ekonomi.
- c. Menetapkan dan memungut retribusi kepada pelaku usaha wisata atas pemanfaatan fasilitas yang ada.

Dalam hal ini Warga desa sebagai pelaksana dalam pengelolaan daya tarik wisata memberikan pelayanan yang prima dengan menyediakan tenaga kerja. Hambatan pengelolaan area parkir wisata dikarenakan adanya sifat warga yang sering membuang sampah di area parker dan keterbatasan area parker. Terbatasnya lahan untuk area parkir disebabkan lahan yang ada di Desa Karang Bajo masih dipunyai *pecatu gubuk*. Sehingga, area parkir tidak luas digunakan.

2) *Stakeholder* kunci

Stakeholder kunci adalah bagian kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Yang menjadi *stakeholder* kunci diantaranya: Pemerintah Desa Karang Bajo, BUMDES, dan BPD.. Adapun kegiatan terkait peran sebagai *Policy creator* diantaranya:

- a. Melaksanakan kegiatan diskusi antar masyarakat, pokdarwis, dan BUMDES untuk pengambilan keputusan dalam hal pengelolaan daya tarik wisata.
- b. Pengambilan keputusan yang penting dalam proses pengelolaan khususnya dalam pengelolaan daya tarik wisata di desa karang bajo.
- c. Memberikan pemahaman lebih terkait dengan pemahaman pengelolaan dengan dilakukannya diskusi bersama-sama.

Pemerintah Desa, BUMDES, dan BPD dalam melakukan peran menjadi *policy creator* untuk pengelolaan daya tarik wisata berperan penting dalam pengambilan keputusan, dalam hal pengambilan keputusan pemerintah desa juga harus melihat baik dan buruknya hasil keputusan. Hambatan yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan diantaranya Saling ketersinggungan dan perdebatan dalam musyawarah, pendapat seseorang selalu diremehkan. Dan Kurangnya partisipasi warga, pokdarwis dalam kegiatan musyawarah.

Adapun kegiatan terkait peran sebagai *coordinator* diantaranya:

- a. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* lain yaitu masyarakat, pokdarwis, Bumdes, dan pemilik usaha di objek wisata.
- b. Koordinasi melalui rapat dengan pelaku usaha seperti rapat paguyuban warung, paguyuban permainan yang dilakukan setiap bulan.
- c. Melakukan rapat antar *stakeholder* terkait Pengelolaan Daya Wisata Desa Karang Bajo guna

mengevaluasi kegiatan yang telah terlaksana.

Pemerintah Desa dalam melakukan koordinasi tergantung pada peran warga dan pokdarwis sebagai pelaksana. Hambatan pemerintah Desa dalam melakukan koordinasi yaitu: (1) sulitnya komunikasi dengan Masyarakat Desa dan pokdarwis dalam pengelolaan daya tarik wisata. (2) Koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan pokdarwis tidak disertai dengan kesepakatan sehingga tidak ada sanksi yang mengikat. Pemerintah desa selaku *koordinator* tergantung pada partisipasi warga desa dan pokdarwis untuk terlibat dalam kegiatan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Desa Karang Bajo.

Adapun kegiatan terkait peran sebagai *fasilitator* diantaranya:

- a. Menyediakan segala fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata.
- b. Pembangunan sarana prasarana Daya Tarik Wisata antara lain: pelebaran jalan menuju objek wisata, perbaikan gapura (papan informasi).
- c. Pemberian kontribusi dalam pendanaan yang dialokasikan untuk kepentingan daya tarik wisata.
- d. Penyediaan informasi dan fasilitas kepariwisataan.
- e. Meningkatkan sarana prasarana pendukung wisata.
- f. Melakukan kegiatan promosi.
- g. Sosialisasi sadar wisata kepada warga dan wisatawan terkait upaya pelestarian lingkungan.
- h. Pemberian banner tentang pelestarian budaya.

Peran pemerintah desa sebagai *fasilitator* yaitu penyediaan fasilitas yang menunjang kegiatan kepariwisataan. Pemerintah Desa belum bisa menyediakan akses area parkir saat hari libur, penyediaan tenaga kerja tambahan ketika event atau hari libur. Dan Pemerintah Desa juga belum bias menyediakan gapura untuk lokasi daya tarik wisata. Hambatan-hambatan Peran Pemerintah Desa sebagai *fasilitator* yaitu penyediaan informasi berupa promosi Desa Karang Bajo belum dilakukan secara meluas baik melalui media cetak maupun elektronik dikarenakan anggaran yang dimiliki masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Adapun kegiatan terkait peran sebagai *implementer* diantaranya:

- a. Mengikutsertakan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam sosialisasi Pengelolaan Daya Tarik wisata yang diadakan oleh desa.
- b. Memberikan usulan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan Daya Tarik Wisata berupa proposal.
- c. Pemberdayaan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan, pelestarian lingkungan pariwisata.

Pemerintah Desa sebagai *implementer* tergantung pada kesediaan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dalam mengikuti pemberdayaan wisata dan respon dari pemerintah atas usulan yang diajukan oleh Pemerintah Desa, wujud pemberdayaan pokdarwis berupa studi banding Desa Wisata ke Desa Wisata lainnya. Hambatan Pemerintah Desa sebagai pelaksana yaitu usulan yang diajukan kepada pemerintah masih tahap proses sehingga peran pemerintah desa menjadi terhambat.

Adapun kegiatan terkait peran sebagai *akselerator* diantaranya:

- a. Menambah kebutuhan pekerja dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- b. Peran pemerintah juga mencari hambatan dalam Pengelolaan Daya Tarik tersebut.
- c. Sebagai organizer untuk percepatan perencanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata.

Peran pemerintah desa sebagai *akselerator* dalam pengelolaan daya Tarik wisata berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi suatu program dapat berjalan dengan sesuai saran yang diinginkan, hal tersebut pemerintah desa mencari hambatan-hambatan apa saja yang membuat program pengelolaan tidak bias berjalan dengan maksimal. Hambatan yang terjadi diantaranya dalam kegiatan pengelolaan minimnya pekerja yang dipekerjakan, dana yang dianggarkan untuk

Pengelolaan Daya Tarik Wisata masih tahap proses sehingga percepatan dalam pengelolaan terhandat.

3) *Stakeholder* sekunder

Stakeholder sekunder adalah bagian yang tidak akan berhubungan langsung terhadap suatu program, dalam kebijakan atau sebuah proyek. Namun *stakeholder sekunder* mempunyai rasa simpati dan kepedulian, sehingga banyak dari mereka turut serta dalam mengemukakan pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap *stakeholder* primer serta keputusan resmi pemerintah. Yang menjadi *stakeholder* sekunder diantaranya:

1) Dinas Pariwisata.

2) Aparat keamanan.

Dinas pariwisata sebagai *fasilitator* Penyediaan fasilitas Kepariwisataaan, Penyediaan sarana prasarana pendukung ekowisata.

Peran Dinas Pariwisata menyediakan sarana prasaran pendukung seperti bak sampah, wc umum. Peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator belum maksimal sekali karena bantuan yang di berikan hanya sekali saja.

Aparat keamanan sebagai *fasilitator*. Kepolisian melakukan penjagaan objek wisata dan mengatur lalu lintas. Peran aparat keamanan sebagai *fasilitator* yaitu memfasilitasi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat. Peran aparat keamanan sangat bergantung pada masyarakat desa selaku tuan rumah dalam menyediakan polisi wisata.

Peran *policy creator* dijalankan Pemerintah Desa Karang Bajo terkait pengelolaan Daya Tarik Wisata. Kepala Desa berperan sebagai *fasilitator* dan mengarahkan kepada para organisasi karang taruna, warga, dan pokdarwis untuk Pengelolaan Daya Tarik Wisata. Berdasarkan identifikasi peran *stakeholder*, bahwa masing-masing *stakeholders* lebih menjalankan perannya sebagai *fasilitator* dalam bentuk fisik yaitu menyediakan sarana prasarana akan tetapi tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan khususnya untuk pelaku usaha wisata.

Kerjasama yang dilakukan antar *stakeholder* dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata bersifat sukarela. Berdasarkan pengkelompokan kemitraan menurut Sulistani (2014) masuk dalam kategori kemitraan *mutualistik*. Kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, sehingga mencapai tujuan secara optimal. Kerjasama tersebut dilakukan para *stakeholders* antara lain: (1) Pemerintahan desa dengan warga, karang taruna, dan pokdarwis. Kerjasama berupa pengadaan sarana prasarana pariwisata antara lain warung makan, penyewaan kain tenun dan toko *souvenir*. (2) Pemerintahan desa dengan Dinas Pariwisata. Perijinan dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara kepada warga Desa Karang Bajo untuk mendirikan usaha dan mengelola. (3) Pemerintahan desa dengan Aparatur Keamanan. Pemerintah desa melakukan kerjasama dengan kepolisian untuk membantu mengamankan Daya Tarik Wisata setiap ada *event-event* dan hari besar adat.

Faktor Penghambat Peran *Stakeholders* dalam Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok Utara antara lain: (a) Terbatasnya Lahan untuk area parker. (b) Terbatasnya Anggaran Kegiatan pengelolaan Daya Tarik Wisata Desa Karang bajo. (c) Terbatasnya Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan pariwisata. (d) Pola Pikir Warga Desa Karang Bajo mayoritas adalah petani, perternak, penenun, dan pengrajin miniatur. (e) Belum ada regulasi dari pemerintah daerah tentang BUMDES terkait pengelolaan Daya Tarik Wisata di desa. (f) Promosi Pariwisata yang Dilakukan Kurang Maksimal Promosi yang dilakukan Pemerintah Desa melalui media *social* seperti instagram, facebook, dan webset tetapi promosi jarang dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Ada beberapa Peran *Stakeholder* pemerintah desa di Desa Karang Bajo yang meliputi : (a) Peran sebagai Policy Creator. (b) Peran sebagai Koordinator. (c) Peran sebagai Fasilitator. (d) Peran sebagai Impelementer. (e) Peran sebagai Akselelator. *Stakeholders* yang terlibat di dalam pengelolaan daya tarik wisata terdiri dari *stakeholders* primer, kunci dan *sekunder*. Pemerintah Desa, BUMDES, dan BPD merupakan *stakeholders* kunci yang memiliki peran penting dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata Desa Karang Bajo. *Stakeholders* sekunder meliputi Dinas Pariwisata dan aparat keamanan.

Denagn Peran Pemerintah Desa sebagai *stakeholder* melakukan kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam Pengelolaan Dya Tarik Wisata yang ada. Peran Pemerintah Desa mulai dari penentuan kebijakan, mengkoordinir, memfasilitasi, pelaksana kebijakan, dan percepatan suatu program. Dari sekian peran, *policy creator* belum optimal dibuktikan dengan saling ketersinggungan dan perdebatan dalam musyawarah, pendapat seseorang selalu diremehkan. Dan kurangnya partisipasi warga, POKDARWIS dan kegiatan musyawarah. Peran *koordinator* juga belum optimal karena Pemeritah Desa selaku *koordinator* tergantung pada partisipasi Warga Desa dan POKDARWIS untuk terlibat dalam kegiatan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata.

Peran Fasilitator juga masih belum optimal karena anggaran yang dimiliki desa masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Peran Pemerintah Desa Karang Bajo sebagai *impelementer* sudah cukup baik di lihat dari kegiatan berupa studi banding Desa Wisata ke desa lainnya yang dilakukan POKDARWIS desa Karang Bajo. Dan peran pemerintah desa sebagai *Akselerator* berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi suatu program dapat berjalan dengan sesuai sasaran yang diinginkan namun hambatan-hambatan yang sering terjadi yakni minimnya pekerja yang diperkerjakan, dan dana yang dianggarkan untuk pengelolaan Daya Tarik Wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahmat Fathoni. 2006. Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [2] Cantania Mongkol (2015) strategi dinas pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata budaya di Kabupaten Minahasan. Jurnal Ilmu Politik, 2016 - neliti.com
- [3] HC Nugroho, S Zauhar, S Suryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. Journal of Environment 2014, h.16-17.
- [4] Handyaningrat, Soewarno.1997.Pengantar Ilmu Administrasi dan Managemen.Cetakan Kedua PT. Gunung Agung. Jakarta
- [5] Handoko,T.Hani.1997. Manejmen dalam pembangunan.yogyakarta:BPFE
- [6] Hetifah, S.J Sumarto. (2003) Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- [7] Krippendorff, K. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks, California: Sage Publication, Inc; 2004.
- [8] Liyushiana, L., Rizkiyah, P., & Herman, H. (2019). Daya Tarik Wisata Pascabencana Erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jurnal Destinasi Pariwisata, 7(2), 421.
- [9] LALU EKA, PUTRA SUWANDANI (2019) PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM MELAKUKAN PROMOSI WISATA DI

-
- DAERAH LOMBOK UTARA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- [10] Latupapua, Yosevita Th.2015. impelementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku tengah• Jurnal Agroforestri X Nomor 1 ISSN : 1907- 7556.
- [11] Medi, Ratna and Yamin, Muh. Nr and Sakawati, Herlina (2018) Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Religi Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja. Diploma thesis, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.
- [12] Rifaul Kirom, Novita, S. & A. P. I. W. J. (2016). Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Wisata Kepuasan Wisatawan, Jurnal Pendidikan.1 (3),536–546.
- [13] Soekanto, Soejono. (2004). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Bumi Aksara
- [14] Scheemer, Kammi. (2000) Stakeholder Analysis Guidelines, Policy Toolkit for Strengthening Health Sector Reform. USA, LACHSR Health Sector Reform Intiative.
- [15] Sulistiyani, Teguh Ambar, 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Yogyakarta : Gava Media.
- [16] Syarifuddin, D. (2018). Pasar Tradisional Dalam Perspektif Nilai Daya Tarik Wisata. Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure, 15(1), 19–32.
- [17] Sapti, M. (2019). Daya tarik wisata jumprit di kabupaten tumanggung berdampak pada minat kunjungan wisatawan. Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi), 53(9), 1689–1699.
- [18] Sutarno, NS.2004. Manajemen Perpustakaan . Jakarta: Samitra Media Utama.
- [19] Wakka, Kadir. (2014) Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol.3 No.1, April 2014 : 47-55
- [20] Undang-Undang:
- [21] Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [22] Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.